

KETERLIBATAN MEDIA MASSA ONLINE DALAM INTEGRASI NASIONAL DAN HARMONISASI SOSIAL: ARAH PEMBERITAAN PERPPU N0 2/2017 TENTANG PEMBUBARAN ORMAS PADA KOMPAS, MEDIA INDONESIA, DAN SINDONEWS

Dani Vardiansyah
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk, Jakarta 11510
dani.vardiansyah@esaunggul.ac.id

Abstract

The study attempted to look at the direction of writing in three mass media in the July period; yaitu Media Indonesia which is assumed to support the government, SindoNews which is oposan, and the neutral Compass. The research used quantitative content analysis method. Media Indonesia is totally seen to support the government. The compass is assumed to be neutral, given its written totals, it is netyral, but when it is breakdown, in August it tends to counter. While SindoNews is interpreted as oposan, the attitude of opposition is not too tota because it still contains pro-government writing.

Keywords: *writing direction, mass media, national*

Abstrak

Penelitian mencoba melihat arah tulisan di tiga media massa pada periode Juli Agustus; yaitu Media Indonesia yang diasumsikan mendukung pemerintah, SindoNews yang bersifat oposan, dan Kompas yang netral. Penelitian menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Media Indonesia secara total terlihat mendukung pemerintah. Kompas yang diasumsikan netral, jika dilihat pertotal tulisannya, memang netyral, tapi ketika di-breakdown, pada bulan Agustus cenderung kontra. Sementara SindoNews yang dimaknai selaku oposan, sikap oposisinya tidaklah terlalu tota karena masih memuat tulisan yang pro pemerintah.

Kata kunci: arah tulisan, media massa, nasional

Pendahuluan

Merujuk kepada Renstra Fakultas Ilmu Komunikasi sebagaimana diturunkan dari Renstra Universitas Esa Unggul, yaitu terkait butir 2 “... Penerapan Pengelolaan Bencana, Integrasi Nasional serta Harmonisasi Sosial...”, adalah menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana arah pemberitaan Perppu No. 2/2017 tentang Pembubaran Ormas sebagaimana ditulis Kompas, Media Indonesia dan SindoNews dalam versi online mereka.

Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli

2017 sebagai penyempurnaan UU 17/2013 tentang Ormas yang mengatur beberapa ketentuan yang belum diatur UU. Pengu-
muman penerbitan Perppu dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di Jakarta pada Rabu (12/7/2017).

Beberapa perbedaan krusial antara UU Ormas dengan Perppu Ormas adalah, pertama, bukan semata komunisme. Dalam Perppu 2/2017, pemerintah memperluas definisi sebagaimana dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c, “... ajaran atau paham yang bertentangan

dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945". Sedangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013, definisi terbatas pada "ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme" saja.

Kedua, proses pembubaran menjadi lebih mudah. Perppu No 2/2017 pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Hal ini berarti bahwa peringatan tertulis tidak lagi diberikan secara bertahap. Pasal ini menghapus ketentuan di UU Ormas terdahulu yang mengatur pembubaran harus melalui tahapan sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis, sehingga memerlukan waktu relatif lama dengan proses yang panjang

Ketiga, azas *contrario actus*. Tidak sebagaimana UU sebelumnya, Perppu ini menyatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Bagian penjelasan Pasal 61 ayat (3) menyebutkan, penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keempat, sanksi pidana. Perppu baru mengatur sanksi pidana terhadap anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang pro-kekerasan dan anti-Pancasila. Sebelumnya, ketentuan ini tidak diatur dalam UU Ormas yang lama. Pasal 82A ayat (1) menyebutkan, "anggota dan/ atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang

menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun." Sanksi yang sama juga bisa diberikan kepada ormas yang melakukan tindakan permusuhan berbau SARA (suku, agama, ras dan golongan) dan penistaan atau penodaan agama. Selanjutnya, Pasal 82A ayat (2) mengatur mengenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap anggota dan/atau pengurus ormas yang mengancam, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sanksi juga bisa diberikan kepada anggota ormas yang melakukan kegiatan separatis dan menggunakan atribut organisasi terlarang.

Dengan adanya beberapa perubahan di atas, maka Perppu ini menuai pro-kontra. Karenanya, menarik untuk meneliti arah pemberitaan Perppu ini di Kompas, Media Indonesia, dan SindoNews dalam versi online.

Dipilihnya media ini sebagai bahan penelitian karena ketiganya memiliki versi TV, cetak, dan online. Untuk memudahkan pengumpulan data dan dokumentasi, maka dipilih versi online sebagai sampel penelitian. Sampel diambil dengan cara mengklik kata kunci "Perppu No 2 Kompas Juli 2017", "Perppu No 2 Media Indonesia Juli 2017", dan "Perppu No 2 Sindonews Juli 2017" pada mesin pencari Google. Maka, hasil pencarian yang relevan dengan objek dan subjek penelitian pada halaman pertama Google ini dijadikan sampel.

Kompas dipilih karena diasumsikan sebagai media yang netral, tidak ada tokoh politik di belakang kepemilikannya. Media Indonesia dipilih mengingat kepemilikannya oleh Surya Paloh dari Partai Nasdem yang cenderung dianggap pro-pemerintah. Sebaliknya SindoNews, yang dimiliki oleh Hary Tanoe, yang dalam Pilkada DKI misalnya, cenderung berada

Tabel 2
Hasil Penelitian Arah Isu Pada Tiga Media Penelitian
n=32

Sampel ke	Koran Online	Bulan 2017	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S1	Media Indonesia	Juli		1		Pro Perppu dengan catatan
S2			1			Jika ada ormas yang keberatan dibubarkan dapat menggugat ke PTUN
S3			1			Perppu dibutuhkan untuk menjaga NKRI
S4			1			Perppu diperlukan guna mencegah radikalisme terorganisasi
S5	SindoNews				1	Banyak kerancuan dan harus di Judicial Review
S6					1	Perppu Ormas adalah tirani oonstitusional yang tidak menjawab permasalahan ormas
S7					1	Perppu ormas adalah ancaman bagi semua ormas
S8			1			Perppu ormas penting cegah lahirnya radikalisme, pemerintah harus mensosialisasikan dengan lebih baik
S9			1			Setuju, tapi jangan gunakan sewenang-wenang
S10					1	Perppu ormas bentuk arogansi penguasa
S11	Kompas		1			Perppu cara demokratis mengendalikan negara
S12					1	Tidak ada kepentingan yang memaksa lahirnya Perppu
S13			1			Demokrasi terancam jika perppu tidak diterbitkan
S14				1		Menyajikan pendapat pro kontra perppu
S15				1		Perppu ormas akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR
S16				1		Pengujian pasal perppu harus dilakukan
S17			1			Pemerintah berhak membuat Perppu
S18	Media Indonesia	Agustus	1			Nasdem yakin an mendukung Perppu disahkan menjadi UU
S19			1			Membahas mekanisme persetujuan/penolakan perppu menjadi UU
S20			1			Perlu ketegasan dalam pengaturan negara
S21	SindoNews				1	PAN merekomendasikan pengkajian perppu
S22					1	Penolakan perppu ormas oleh serikat buruh
S23					1	Serikat buruh menolak perppu dan akan geruduk DPR
S24					1	Massa memprotes parpol yang mendukung perppu ormas
S25	Kompas			1		Sidang MK terkait perppu ormas
S26					1	Kegagalpahaman pemerintah atas dua hal
S27					1	Para pengacara menggugat perppu ormas
S28			1			Forum advokat menyukung MK menolak gugatan perppu ormas
S29					1	Penerbitan perppu ormas tidak sesuai aturan
S30					1	ACTA menggugat perppu ormas
S31			1			Yenny Whid menilai tidak ada yang salah terkait perppu ormas
S32				1		Sidang MK terkait perppu ormas
			13	6	13	32
			41%	19%	41%	100%
KP: Kolom Pakar/Artikel Opini Ahli						
BP: Berita Pendapat						

Dari total sampel penelitian atas tiga media, 41% tulisan bersifat pro, 41% kontra, dan 19% sisanya netral. Artinya, terdapat keseimbangan tulisan yang pro dan kontra pada tiga media subjek penelitian.

Tabel 3
Arah Pemberitaan Media Indonesia Juli – Agustus
 n=7

Bulan 2017	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Tulisan			
			Pro	Netral	Kontra	
Juli	Perppu No 2 Tahun 2017 Ancaman Demokrasi Beradab Menyikapi Perppu Ormas	KP		1		Pro Perppu dengan catatan
	Tegas dan Lelas Menindak Ormas	KP	1			Jika ada ormas yang keberatan dibubarkan dapat menggugat ke PTUN
	Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisasi	KP	1			Perppu dibutuhkan untuk menjaga NKRI
		KP	1			Perppu diperlukan guna mencegah radikalisme terorganisasi
Agustus	NasDem yakin Perppu Ormas Lolos di DPR	BP	1			Nasdem yakin an mendukung Perppu disahkan menjadi UU
	Komisi II Tunggu Surat Resmi Pembubaran	BP	1			Membahas mekanisme persetujuan/penolakan perppu menjadi UU
	DPR Didesak Sahkan Perppu Ormas	BP	1			Perlu ketegasan dalam pengaturan negara
			6	1	0	7
		TOTAL	86%	14%	0%	100%

Jika dilihat khusus pada Media Indonesia untuk bulan Juli Agustus, total terdapat 7 tulisan terkait Perppu Ormas. Dari 7 tulisan itu, 86% di antaranya cenderung pro Perppu Ormas.

Tabel 4
Arah Pemberitaan SindoNews Juli – Agustus
 n=10

Bulan 2017	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Tulisan			
			Pro	Netral	Kontra	
Juli	Pidana dalam Perppu Ormas	KP			1	Banyak kerancuan dan harus di Judicial Review
	Perppu Ormas dan Tirani Konstitusional	KP			1	Perppu Ormas adalah tirani oonstitusional yang tidak menjawab permasalahan ormas
	Perppu Ormas Ancaman bagi Semua Ormas	KP			1	Perppu ormas adalah ancaman bagi semua ormas
	Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Penting	KP	1			Perppu ormas penting cegah lahirnya radikalisme, pemerintah harus mensosialisasikan dengan lebih baik
	Perppu Pembubaran (Bukan) HTI	KP	1			Setuju, tapi jangan gunakan sewenang-wenang
	GNPF MUI Nilai Perppu Ormas Bentuk Arogansi	KP			1	Perppu ormas bentuk arogansi penguasa
Agustus	Rakernas PAN Rekomendasikan Fraksi Kaji Perppu	BP			1	PAN merekomendasikan pengkajian perppu
	Serikat Buruh Siap Gugat Perppu Ormas ke Mahkamah	BP			1	Penolakan perppu ormas oleh serikat buruh
	Protes Perppu Ormas, Serikat Buruh akan Gelar Aksi	BP			1	Serikat buruh menolak perppu dan akan geruduk DPR
	Massa Protes Parpol Pendukung Perppu Ormas	BP			1	Massa memprotes parpol yang mendukung perppu ormas
			2	0	8	10
		TOTAL	20%	0%	80%	100%

Khusus untuk SindoNews, terdapat 10 tulisan pada Juli Agustus, 80% di antaranya cenderung kontra Perppu Ormas.

Tabel 5
Arah Pemberitaan Kompas Juli-Agustus
n=10

Bulan 2017	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
Juli	Perppu Dinilai Lebih Demokratis daripada U	KP	1			Perppu cara demokratis mengendalikan negara
	Perpu Terbit tapi Tidak Ada Ormas yang	BP			1	Tidak ada kepentingan yang memaksa lahirnya Perppu
	Kepentingan Perppu Ormas Jelas, Ada Organ	BP	1			Demokrasi terancam jika perppu tidak diterbitkan
	Mengukur Kepentingan Pembubaran HTI dan	BP		1		Menyajikan pendapat pro kontra perppu
	Perppu Ormas segera Dibacakan pada Sidang	BP		1		Perppu ormas akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR
	HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Orm	BP		1		Pengujian pasal perppu harus dilakukan
	Dukung Perppu Ormas, MUI Minta Umat Isla	BP	1			Pemerintah berhak membuat Perppu
Agustus	Rabu, MK Gelar Sidang atas Tujuh Gugatan te	BP		1		Sidang MK terkait perpu ormas
	Perpu Ormas Terbit, Pemerintah Dinilai Gag	BP			1	Kegagalan pemahaman pemerintah atas dua hal
	Para Pengacara Ini Gugat Perppu Ormas Buk	BP			1	Para pengacara menggugat perppu ormas
	Forum Advokat Pengawal Pancasila Yakini M	BP	1			Forum advokat mendyukung MK menolok gugatan perppu ormas
	Uji Materi ACTA Nilai Penerbitan Perppu Orr	BP			1	Penerbitan perppu ormas tidak sesuai aturan
	Takut Dibubarkan, ACTA Ikutan Gugat Perpp	BP			1	ACTA menggugat perppu ormas
	Perppu Ormas, Yenny Wahid Nilai Tak Ada	BP	1			Yenny Whid menilai tidak ada yang salah terkait perppu ormas
Senin Pagi, MK Gelas Sidang Uji Materi Perp	BP		1		Sidang MK terkait perppu ormas	
			5	5	5	15
			33%	33%	33%	100%

Sementara Kompas menurunkan 15 masing (33%) bersifat pro, netral, dan tulisan terkait Perppu dalam kurun Juli kontra. Agustus, di mana secara setara masing-

Tabel 6
Penulisan PERPPU Ormas di Media Indonesia
n=17

Sampel ke	Koran Online	Judul	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S1	Media Indonesia	Perppu No 2 Tahun 2017 Ancaman Demokrasi?		1		Pro Perpu dengan catatan
S2		Beradab Menyikapi Perppu Ormas	1			Jika ada ormas yang keberatan dibubarkan dapat menggugat ke PTUN
S3		Tegas dan Lelas Menindak Ormas	1			Perpu dibutuhkan untuk menjaga NKRI
S4		Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisas	1			Perpu diperlukan guna mencegah radikalisme terorganisasi
S5	SindoNews	Pidana dalam Perppu Ormas			1	Banyak kerancuan dan harus di Judicial Review
S6		Perppu Ormas dan Tirani Konstitusional			1	Perppu Ormas adalah tirani oonstitusional yang tidak menjawab permasalahan ormas
S7		Perppu Ormas Ancaman bagi Semua Ormas			1	Perppu ormas adalah ancaman bagi semua ormas
S8		Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Penting	1			Perppu ormas penting cegah lahirnya radikalisme, pemerintah harus mensosialisasikan dengan
S9		Perppu Pembubaran (Bukan) HTI	1			Setuju, tapi jangan gunakan sewenang-wenang
S10		GNPF MUI Nilai Perppu Ormas Bentuk Arogansi			1	Perppu ormas bentuk arogansi penguasa
S11	Kompas	Perppu Dinilai Lebih Demokratis daripada U	1			Perppu cara demokratis mengendalikan negara
S12		Perpu Terbit tapi Tidak Ada Ormas yang			1	Tidak ada kepentingan yang memaksa lahirnya Perppu
S13		Kepentingan Perppu Ormas Jelas, Ada Organ	1			Demokrasi terancam jika perppu tidak diterbitkan
S14		Mengukur Kepentingan Pembubaran HTI dan Penerbit	1			Menyajikan pendapat pro kontra perppu
S15		Perppu Ormas segera Dibacakan pada Sidang		1		Perppu ormas akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR
S16		HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Ormas		1		Pengujian pasal perppu harus dilakukan
S17		Dukung Perppu Ormas, MUI Minta Umat Isla	1			Pemerintah berhak membuat Perppu
			8	4	5	17
			47%	24%	29%	100%

Jika dilihat pada periode Juli 2017 tulisan terkait Perppu Ormas. Dari ke 17 atas tiga media subjek penelitian, data menunjukkan bahwa terdapat total 17 tulisan itu, 47% cenderung pro, 24% netral, dan 29% kontra.

Tabel 7
Penulisan PERPPU Ormas di Media Indonesia, SindoNews, Kompas pada Bulan Agustus 2017
n=15

Sampel ke	Koran Online	Judul	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S18	Media Indonesia	NasDem yakin Perppu Ormas Lolos di DPR	1			Nasdem yakin an mendukung Perppu disahkan menjadi UU
S19		Komisi II Tunggu Surat Resmi Pembubaran	1			Membahas mekanisme persetujuan/penolakan perppu menjadi UU
S20		DPR Didesak Sahkan Perppu Ormas	1			Perlu ketegasan dalam pengaturan negara
S21	SindoNews	Rakernas PAN Rekomendasikan Fraksi Kaji Perppu				1 PAN merekomendasikan pengkajian perppu
S22		Serikat Buruh Siap Gugat Perppu Ormas ke MK				1 Penolakan perppu ormas oleh serikat buruh
S23		Protes Perppu Ormas, Serikat Buruh akan Geruduk				1 Serikat buruh menolak perppu dan akan geruduk DPR
S24		Massa Protes Parpol Pendukung Perppu Ormas				1 Massa memprotes parpol yang mendukung perppu ormas
S25	Kompas	Rabu, MK Gelar Sidang atas Tujuh Gugatan terhadap Pe		1		Sidang MK terkait perppu ormas
S26		Perppu Ormas Terbit, Pemerintah Dinilai Gagal				1 Kegagalpahaman pemerintah atas dua hal
S27		Para Pengacara Ini Gugat Perppu Ormas Bukan				1 Para pengacara menggugat perppu ormas
S28		Forum Advokat Pengawal Pancasila Yakini M	1			Forum advokat mendukung MK menolak gugatan perppu ormas
S29		Uji Materi ACTA Nilai Penerbitan Perppu Ormas				1 Penerbitan perppu ormas tidak sesuai aturan
S30		Takut Dibubarkan, ACTA Ikutan Gugat Perppu Ormas				1 ACTA menggugat perppu ormas
S31		Perppu Ormas, Yenny Wahid Nilai Tak Ada	1			Yenny Whid menilai tidak ada yang salah terkait perppu ormas
S32		Senin Pagi, MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas		1		Sidang MK terkait perppu ormas
			5	2	8	15
			33%	13%	53%	100%

Data table menunjukkan bahwa terdapat 15 tulisan terkait Perppu Ormas pada bulan Agustus. Dari 15 tulisan itu, 33% cenderung pro, 13% netral, dan 53% kontra.

Tabel 8
Penulisan PERPPU Ormas pada Juli 2017 di Media Indonesia
n=4

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S1	Perppu No 2 Tahun 2017 Ancaman Demokras	KP		1		Pro Perpu dengan catatan
S2	Beradab Menyikapi Perppu Ormas	KP	1			Jika ada ormas yang keberatan dibubarkan dapat menggugat ke PTUN
S3	Tegas dan Lelas Menindak Ormas	KP	1			Perpu dibutuhkan untuk menjaga NKRI
S4	Perppu Mencegah Radikalisme Terorganisas	KP	1			Perpu diperlukan guna mencegah radikalisme terorganisasi
			3	1	0	4
		TOTAL	75%	25%	0%	100%

Media Indonesia, pada bulan Juli, menurunkan 4 tulisan. 75% di antaranya bersifat pro Perppu Ormas. SindoNews pada bulan Juli, di mana 50% cenderung kontra, 38% pro, dan 13% netral.

Tabel 9
Penulisan PERPPU Ormas pada Juli 2017 di SindoNews
 n=8

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S5	Pidana dalam Perppu Ormas	KP			1	Banyak kerancuan dan harus di Judicial Review
S6	Perppu Ormas dan Tirani Konstitusional	KP			1	Perppu Ormas adalah tirani oonstitusional yang tidak menjawab permasalahan ormas
S7	Perppu Ormas Ancaman bagi Semua Ormas	KP			1	Perppu ormas adalah ancaman bagi semua ormas
S8	Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Penting	KP	1			Perppu ormas penting cegah lahirnya radikalisme, pemerintah harus mensosialisasikan dengan
S9	Perppu Pembubaran (Bukan) HTI	KP	1			Setuju, tapi jangan gunakan sewenang-wenang
S10	GNPF MUI Nilai Perppu Ormas Bentuk Arogan	KP			1	Perppu ormas bentuk arogansi penguasa
			3	1	4	8
		TOTAL	38%	13%	50%	100%

Tabel 10
Penulisan PERPPU Ormas pada Juli 2017 di Kompas
 n=7

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Arah Isu			
			Pro	Netral	Kontra	
S11	Perppu Dinilai Lebih Demokratis daripada UU	KP	1			Perppu cara demokratis mengendalikan negara
S12	Perpu Terbit tapi Tidak Ada Ormas yang	BP			1	Tidak ada kepentingan yang memaksa lahirnya Perppu
S13	Kepentingan Perppu Ormas Jelas, Ada Organ	BP	1			Demokrasi terancam jika perppu tidak diterbitkan
S14	Mengukur Kegentingan Pembubaran HTI dan	BP		1		Menyajikan pendapat pro kontra perppu
S15	Perppu Ormas segera Dibacakan pada Sidang	BP		1		Perppu ormas akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR
S16	HTI Galang Dukungan Penolakan Perppu Orm	BP		1		Pengujian pasal perppu harus dilakukan
S17	Dukung Perppu Ormas, MUI Minta Umat Isla	BP	1			Pemerintah berhak membuat Perppu
			3	3	1	7
		TOTAL	43%	43%	14%	100%

Pada Juli 2017, Kompas cenderung pro, 43% netral, dan hanya 14% menurunkan 7 tulisan Perppu Ormas, 43% yang kontra.

Tabel 11
Penulisan PERPPU Ormas pada Agustus 2017 di Media Indonesia
 n=3

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Tulisan			
			Pro	Netral	Kontra	
S18	NasDem yakin Perppu Ormas Lolos di DPR	BP	1			Nasdem yakin an mendukung Perppu disahkan menjadi UU
S19	Komisi II Tunggu Surat Resmi Pembubaran	BP	1			Membahas mekanisme persetujuan/penolakan perppu menjadi UU
S20	DPR Didesak Sahkan Perppu Ormas	BP	1			Perlu ketegasan dalam pengaturan negara
			3	0	0	3
		TOTAL	100%	0%	0%	100%

Pada bulan Agustus 2017, Media Indonesia menurunkan tiga buah tulisan, dimana dari tiga buah tulisan tersebut 100% ber-sifat pro Perppu Ormas.

Tabel 12
Penulisan PERPPU Ormas pada Agustus 2017 di SindoNews
 n=7

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Tulisan			
			Pro	Netral	Kontra	
S21	Rakernas PAN Rekomendasikan Fraksi Kaji P/BP				1	PAN merekomendasikan pengkajian perppu
S22	Serikat Buruh Siag Gugat Perpu Ormas ke M/BP				1	Penolakan perppu ormas oleh serikat buruh
S23	Protes Perppu Ormas, Serikat Buruh akan GaBP				1	Serikat buruh menolak perpu dan akan geruduk DPR
S24	Massa Protes Parpol Pendukung Perppu Orm/BP				1	Massa memprotes parpol yang mendukung perppu ormas
			3	0	4	7
		TOTAL	43%	0%	57%	100%

Terdapat 7 tulisan Perppu Ormas yang diturunkan SindoNews pada Agustus 2017, 57% bersifat kontra dan sisanya (43%) adalah pro.

Tabel 13
 Penulisan PERPPU Ormas pada Agustus 2017 di Kompas
 n=8

Sampel ke	Judul	Kategori	Artikel/Berita			Simpulan
			Tulisan			
			Pro	Netral	Kontra	
S25	Rabu, MK Gelar Sidang atas Tujuh Gugatan teBP			1		Sidang MK terkait perpu ormas
S26	Perpu Ormas Terbit, Pemerintah Dinilai GagBP				1	Kegagal/pahaman pemerintah atas dua hal
S27	Para Pengacara Ini Gugat Perppu Ormas BukBP				1	Para pengacara menggugat perppu ormas
S28	Forum Advokat Pengawal Pancasila Yakini MKBP		1			Forum advokat mendukung MK menolak gugatan perppu ormas
S29	Uji Materi ACTA Nilai Penerbitan Perppu OrmBP				1	Penerbitan perppu ormas tidak sesuai aturan
S30	Takut Dibubarkan, ACTA I kutan Gugat PerppBP				1	ACTA menggugat perppu ormas
S31	Perppu Ormas, Yenny Wahid Nilai Tak Ada BP		1			Yenny Whid menilai tidak ada yang salah terkait perppu ormas
S32	Senin Pagi, MK Gelas Sidang Uji Materi PerppBP			1		Sidang MK terkait perppu ormas
			2	2	4	8
		TOTAL	25%	25%	50%	100%

Kompas pada Agustus 2017 menurunkan 8 tulisan, 50% bersifat kontra sementara masing-masing (25%) bersifat pro dan netral.

Data penelitian menunjukkan pada periode kurun penelitian, yaitu Juli Agustus terdapat 32 sampel penelitian dari tiga media subjek penelitian, yaitu Media Indonesia, SindoNews, dan Kompas. Dari 32 sampel penelitian itu, maka 41% pro, 41% kontra, dan 19% netral.

Jika data ini dipilah perbulan atas total ketiga media subjek penelitian, maka pada bulan Juli 47% pro, 29% kontra, dan 24% netral; sedangkan pada bulan Agustus 53% kontra, 33% pro, dan 13% netral.

Adapun jika dilihat data permedia pada bulan Juli - Agustus, terlihat hasil sebagai berikut: 86% tulisan di Media Indonesia bersifat pro dan 14% netral, sementara tidak satupun yang kontra. Artinya, Media Indonesia cenderung memihak pro Perppu Ormas. Sebaliknya, SindoNews walau bersifat kontra Perppu

Ormas (80%), masih ada tulisan yang pro (20%). Sementara Kompas yang diasumsikan netral, memang tercermin pada angka-angka sebagai berikut: baik pro, netral dan kontra masing-masing adalah 33%.

Jika data dikupas lebih detil perbulan permedia, maka di bulan Juli 75% tulisan di Media Indonesia adalah pro dan 25% netral tanpa ada yang kontra. Sedangkan di SindoNews, 50% kontra, 38% pro, dan hanya 13% netral. Sementara di Kompas, 43% pro, 43% netral, dan hanya 14% yang kontra.

Demikian data bulan Juli. Situasi berbeda di bulan Agustus. Media Indonesia secara konsta (100%) mendukung Perppu Ormas ini. Penolakan SindoNews terlihat secara terlalu estrim (57%) karena 43% di antaranya masih pro, tanda ada yang netral. Kompas yang diasumsikan netral, pada bulan Agustus justeru 50% menurunkan tulisan yang kotra, sementara pro dan netral masing-masing 25%.

Kesimpulan

Media Indonesia secara total terlihat mendukung pemerintah. Kompas yang diasumsikan netral, jika dilihat pertotal tulisannya, memang netral, tapi ketika di-breakdown, pada bulan Agustus cenderung kontra. Sementara SindoNews yang dimaknai selaku oposan, sikap oposisinya tidaklah terlalu tota karena masih memuat tulisan yang pro pemerintah.

Daftar Pustaka

- Gozali, Dodi. (2005). *Communication Measurement*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hidayat, Dedy Nur. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Bandung: Raja Grafindo Perkasa.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Littlejohn, Stephen W. (2008). *Theoris of Human Communication*. Bemont California: Warswoth Publishing Company.
- Mulyana, Deddy. (1995). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.